

BAB IV

ISU PAPUA MENJADI ALASAN PENINGKATAN HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA MELANESIA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

Isu Papua memang tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan Indonesia dengan negara-negara Melanesia selama ini. Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, politik luar negeri Indonesia yang diambil adalah peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia. Peningkatan ini tentu saja telah melalui proses kajian mendalam terhadap alternatif-alternatif yang ada, serta melalui kalkulasi keuntungan dan kerugian sebagai aktor rasional dalam penentuan alternatif terbaik. Peningkatan hubungan juga menjadi jalan bagi Indonesia untuk memaanuver upaya-upaya diplomasi dari kelompok separatis Papua *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) untuk memperoleh dukungan dari negara-negara Melanesia. Dalam BAB IV ini akan dibahas mengenai alasan rasional peningkatan hubungan dengan negara-negara Melanesia oleh pemerintah Indonesia serta strategi pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi dukungan luar negeri terhadap kelompok separatis Papua.

A. Meraih Dukungan Negara-Negara Melanesia

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara Melanesia memegang peranan penting dalam berkembangnya isu Papua di dunia internasional, negara yang menjadi sponsor dari dukungan tersebut yaitu Vanuatu dan Kepulauan Salomon. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari PM Kepulauan Salomon Manasseh Sogavare pada tahun 2016 yang dikutip dari www.radioaustralia.net.au :

"Saya mengakui adanya keinginan Perdana Menteri Vanuatu untuk mengajukan mosi dalam pertemuan MSG untuk meningkatkan status keanggotaan ULMWP dari status peninjau menjadi status anggota penuh. Keputusan anda (PM Vanuatu) untuk mengajukan mosi semacam itu menyentuh hati saya dan mendapat dukungan penuh dari saya. Saya berharap anggota (MSG) lainnya akan turut memberikan dukungan atas agenda penting ini," (RADIO AUSTRALIA, 2016).

Indonesia tidak bisa menganggap remeh dukungan dari negara-negara Melanesia tersebut. Citra Indonesia sudah terlanjur buruk dimata pemerintah dan rakyat beberapa negara Pasifik Selatan yang termasuk negara-negara Melanesia didalamnya yang diakibatkan oleh dosa masa lalu pemerintah Indonesia di era-era sebelum Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo telah melakukan beberapa upaya untuk meyakinkan negara-negara Melanesia bahwa Indonesia telah berubah, Indonesia telah menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap rakyat Papua dan memiliki keseriusan untuk memajukan wilayah Papua melalui proyek-proyek strategis nasional.

Kemudian pemerintah Indonesia di era ini tidak lagi menganggap kawasan Pasifik Selatan sebagai “halaman belakang” dalam politik luar negerinya. Indonesia serius untuk hadir di kawasan Pasifik Selatan dan bersama-sama dengan negara-negara Melanesia untuk memajukan kawasan Pasifik Selatan. Berikut merupakan upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk meraih dukungan dari negara-negara Melanesia :

1. Gencarnya Pembangunan Infrastruktur di Papua pada Era Presiden Joko Widodo

Pada masa pemerintahannya saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki agenda Nawa Cita (Sembilan Cita-Cita) yang ingin diwujudkan pada masa pemerintahannya, yaitu

periode 2014-2019. Salah satu isi dari Nawa Cita tersebut yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (KOMPAS, 2014), yang maksudnya adalah Presiden Jokowi menginginkan daerah-daerah perbatasan, terluar, terdepan, dan ujung negeri harus menikmati pembangunan seperti daerah-daerah lainnya untuk mewujudkan sila kelima dari Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Salah satu daerah yang paling disorot dalam Pemerintahan Presiden Jokowi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selama ini, wilayah Papua memang kerap menjadi sorotan terutama karena sulitnya akses ke Pulau tersebut. Kondisi geografis Papua yang dipenuhi dengan pegunungan dan hutan yang lebat menyebabkan sulitnya sarana transportasi di daerah tersebut. Transportasi utama yang sangat diandalkan di Papua adalah pesawat terbang, tetapi itupun tergantung dengan cuaca yang ada. Sehingga segala kebutuhan logistik, baik makanan, pakaian, maupun bahan material bangunan harus menggunakan pesawat untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Papua. Akibatnya harga-harga barang di Papua menjadi mahal, terjadi disparitas harga yang lumayan tinggi antara harga di Pulau Jawa dan di Pulau Papua.

Target utama yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi, yaitu penurunan kesenjangan harga-harga kebutuhan pokok antara Papua dengan daerah-daerah lain di wilayah Indonesia bagian barat. Program utama yang dilakukan yaitu pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk mempermudah akses ke wilayah-wilayah pegunungan maupun pelosok di daerah Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut berupa Jalan Trans Papua, bandar udara-bandar udara baru, maupun pelabuhan-pelabuhan baru yang berfungsi mewujudkan impian Tol Laut Presiden Jokowi. Jalan Trans Papua dianggap menjadi solusi terbaik untuk mempermudah

Tabel 1.4 Alokasi Dana tahun 2013-2017 untuk Proyek Jalan dan Jembatan di Papua



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian PUPR

Selain giatnya pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi juga menggunakan pendekatan baru dalam membangun Papua. Berbeda dengan Presiden-Presiden sebelumnya yang lebih mengedepankan militer untuk meredam kelompok separatis di Papua, Presiden menggunakan pendekatan yang lebih persuasif, contohnya yaitu Presiden Jokowi membebaskan tahanan-tahanan politik yang ada di Papua serta mempermudah wartawan-wartawan asing untuk datang dan melakukan peliputan di wilayah Papua (BBC, 2015). Presiden Jokowi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga melakukan pembangunan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Papua. Jika Papua memiliki SDM yang memadai, maka stabilitas keamanan akan terkendali dan akan berdampak pada semua bidang yang mendukung kemajuan Papua itu sendiri.

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 hingga akhir tahun 2016 Presiden Jokowi tercatat telah mengunjungi wilayah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat)

sebanyak 4 (empat) kali, Presiden Jokowi menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia pertama yang paling sering menginjakkan kakinya di Bumi Cenderawasih dalam kurun waktu yang sama (Setiawanto, 2016). Presiden Jokowi sangat serius dalam memajukan Papua dan mensejahterakan masyarakat Papua, tujuan utamanya yaitu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi ingin meredam kelompok pro kemerdekaan Papua di Papua tidak dengan pendekatan militer, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Papua serta memajukan Papua untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Sehingga tidak akan muncul lagi istilah Papua dianak-tirikan oleh Jakarta ataupun Pemerintah Indonesia hanya mengeruk kekayaan Papua tanpa memperhatikan masyarakat Papua.

Bukti-bukti keseriusan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini menjadi modal berharga dalam upaya Indonesia untuk meyakinkan negara-negara Melanesia. Pesatnya pembangunan di Papua ini juga kerap kali digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mematahkan argument-argumen dari kelompok separatis Papua yang disebarkan kepada masyarakat di negara-negara Melanesia. Dalam setiap kesempatan kunjungan ke negara-negara Melanesia, pejabat-pejabat tinggi Indonesia selalu menekankan bahwa Papua merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menunjukkan bukti-bukti keseriusan pemerintah Indonesia saat ini kepada negara-negara Melanesia.

Misalnya dalam kunjungan Menteri Koordinator Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan pada saat kunjungan ke Fiji pada bulan April 2016, menyampaikan bahwa :

"Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga tidak boleh ada satupun negara di dunia ini yang mendikte kita. Saya secara langsung menyampaikan

kepada pemerintah Republik Fiji dan Papua Nugini bahwa Papua dan Papua Barat adalah bagian terintegrasi dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Fakta itu bersifat final dan tidak dapat dirundingkan lagi. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk Papua dan Papua Barat. Dari segi pembiayaan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sampai upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia" (Kusumadewi, 2016).

Dengan bukti-bukti tersebut secara perlahan namun pasti Indonesia mulai mendapatkan dukungan dari beberapa negara Melanesia, diantaranya yaitu Fiji dan Papua Nugini. Hal tersebut dibuktikan dengan abstainnya kedua negara tersebut dalam setiap pertemuan negara-negara Pasifik Selatan yang membahas mengenai kemerdekaan Papua, terutama semenjak seringnya kunjungan pejabat tinggi Indonesia ke dua negara tersebut di era Presiden Joko Widodo.

2. Politik “Budi Baik” Terhadap Negara-Negara Melanesia

Setiap negara dalam menjalankan politik luar negeri tentu saja memiliki kepentingan nasional yang ingin diraih, menurut Morgenthau dalam *buku Politic Among Nations* menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah power kekuasaan (Morgenthau, 2010, p. 6). Dalam hal ini yang dimaksud power adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan dari orang atau negara lain sesuai dengan keinginannya. Tujuan Indonesia dalam meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia tentu saja ingin meraih kepentingan nasional Indonesia, tetapi Indonesia lebih menggunakan pendekatan persuasif terhadap mendapatkan *power* tersebut.

Pada dasarnya power tidak harus selalu yang terlihat (*tangible power*), misalnya seperti kekuatan militer. Tetapi

ada juga *power* yang tidak terlihat (*intangible power*), contohnya seperti ekonomi dan kebudayaan. Indonesia menggunakan *intangible power* untuk meraih dukungan dari negara-negara Melanesia. Melalui kerjasama-kerjasama dibidang ekonomi, bantuan-bantuan kemanusiaan, serta penguatan identitas ke-Melanesiaannya pemerintah Indonesia berusaha meraih dukungan dari negara-negara Melanesia dalam isu Papua. Keberhasilan Indonesia untuk meraih dukungan dari negara-negara Melanesia sama halnya dengan Indonesia berhasil menjaga kedaulatan negaranya dan menjaga keutuhan wilayahnya.

Selain identitas ke-Melanesiaan, Indonesia juga berupaya menggunakan politik “Budi Baik” terhadap negara-negara Melanesia. Politik “Budi Baik” tersebut dilakukan dengan cara seringnya Indonesia memberikan bantuan kepada negara-negara Melanesia, baik itu bantuan berupa dana ataupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Hingga saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan tidak kurang dari 130 bantuan program teknis, melibatkan 583 peserta dari negara-negara Pasifik. Bantuan program teknis tersebut diantaranya dalam sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, disaster management, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Dalam bantuan tersebut pemerintah Indonesia mengklaim telah menggelontorkan dana bantuan sekitar 1,8 juta Dollar AS atau sekitar Rp23,6 Triliun kepada negara-negara anggota MSG. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang dilansir melalui KBR.id:

"Selama ini kita juga terus memberikan bantuan *capacity building* kepada negara-negara MSG dari 2014 sampai dengan 2016 ini. Jumlahnya sudah lebih dari sekitar USD 1,8 juta bantuan teknis dalam bentuk *capacity building*. Kita berikan kepada negara-negara anggota MSG di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, *good governance*, *disaster management*, pendidikan, pemberdayaan

perempuan dan lain sebagainya. Itulah nuansa kita" (Wijaya, 2016).

Kemudian pada pertengahan Maret 2015, bencana alam Topan Pam menghantam kawasan Pasifik Selatan dan Vanuatu menjadi negara yang paling terdampak akibat bencana tersebut. Topan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang masif, sehingga melumpuhkan ibukota Vanuatu dan juga memutus akses ke puluhan pulau dan kota di Vanuatu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan bantuan senilai total 2 (dua) juta Dollar AS untuk membantu pemulihan di Vanuatu pasca bencana tersebut. Bantuan tersebut berupa bahan makanan, pakaian, paket untuk ibu dan anak, mesin genset, obat-obatan, tenda posko dan keluarga, kasur lipat, alat kebersihan pribadi dan kesehatan lingkungan (Gabrillin, 2015).

Selain Vanuatu, negara Melanesia lainnya yang sempat terkena bencana Topan yaitu Fiji. Bencana Topan Winston menghantam negara Fiji pada tanggal 21-21 Februari 2015. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan secara simbolis bantuan senilai 5 (lima) juta Dollar AS kepada Perdana Menteri Fiji JV Bainimarama saat melakukan kunjungan kehormatan ke Fiji pada tanggal 31 Maret 2015 (Nursalikhah, 2015). Pada kesempatan tersebut Menteri Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia juga akan mengirim satu kompi pasukan Zeni TNI-AD untuk membantu proses rekonstruksi pasca-bencana Topan Winston di wilayah Fiji.

Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi sangat memperhatikan kawasan Pasifik Selatan terutama negara-negara Melanesia yang memiliki kerawanan bencana, sama seperti yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga dengan adanya peningkatan hubungan akan muncul kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana yang dapat mengancam masing-masing negara.

Hal senada juga disampaikan oleh Wamenlu Fachir dalam pidatonya di forum KTT MSG Ke-20 yang dikuti dari msgsec.com :

“Sebagai negara kepulauan, seperti kebanyakan negara Pasifik, kita dihadapkan pada tantangan bersama. Tantangan bencana alam ... Tantangan perubahan iklim ... Dan tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Inilah tantangan utama yang harus kita hadapi bersama. Inilah tantangan yang menuntut usaha bersama untuk berkembang bersama. Singkatnya, berkembang bersama menyiratkan penguatan komitmen kita untuk bekerja lebih dekat dengan saudara dan saudari kita di MSG ... baik secara bilateral maupun multilateral” (MSG SEC, 2015).

Indonesia mencoba mengkontruksi pemikiran dari negara-negara Melanesia tentang kebaikan Indonesia, sehingga dapat berdampak pada dukungan terhadap Indonesia dalam isu Papua. Usaha Indonesia dengan meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia tidak sia-sia, meskipun belum semua tetapi ada beberapa negara yang telah menunjukkan dukungan terhadap Indonesia, baik dukungan terhadap kehadiran Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan maupun dukungan terhadap bergabungnya Indonesia di organisasi sub-regional *Melanesia Spearhead Group (MSG)*. Negara-negara tersebut yaitu Papua Nugini dan Fiji, kedua negara tersebut sangat mendukung upaya Indonesia untuk menyelesaikan sendiri permasalahan didalam negerinya (isu Papua) dan tidak melakukan intervensi terhadap penyelesaiannya serta mendukung Indonesia tetap menjaga keutuhan wilayahnya (Karafir, 2016).

Dalam kunjungannya ke Papua Nugini pada Maret 2015, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Papua Nugini merupakan tetangga penting bagi Indonesia (Humas Setkab, 2015). Papua Nugini merupakan negara yang

strategis untuk dijadikan sebagai partner kerjasama dalam menjaga kondusifitas keamanan di Papua, terutama untuk mempersempit ruang gerak kelompok separatis yang ingin melarikan diri ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya ke Fiji pada Maret 2016, Menko Polhukam juga membawa misi ingin menunjukkan keseriusan Jakarta terhadap Kawasan Pasifik Selatan serta membawa surat langsung dari Presiden Jokowi untuk PM J.V. Bainimarama yang bertujuan untuk semakin memperkuat hubungan kedua negara.

Dukungan dari dua negara anggota MSG tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi Indonesia, setidaknya Indonesia bisa mengimbangi dukungan dari anggota MSG lainnya terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua. Selama ini negara yang menunjukkan dukungan terhadap kelompok pro kemerdekaan Papua yaitu Kepulauan Salomon dan Vanuatu.

A. Strategi Untuk Mempersempit Ruang Gerak ULMWP di Dunia Internasional

Untuk mengamankan posisi Indonesia dalam isu Papua, pemerintah Indonesia selain meningkatkan hubungan dengan negara-negara Melanesia juga harus menggunakan strategi-startegi diplomasi lain. Penguatan posisi Indonesia dibandingkan dengan kelompok separatis Papua *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dimata negara-negara Melanesia menjadi hal yang penting, terutama untuk meredam dukungan dari negara-negara Melanesia terhadap upaya memerdekakan Papua dari Indonesia. Terdapat dua strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat Pengaruh Indonesia di *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Melanesian Spearhead Group* (MSG) yang ke-20 di Honiara,

Kepulauan Solomon, yang diselenggarakan pada 24-26 Juni 2015 telah memutuskan meningkatkan status Indonesia dari *Observer* menjadi *Associate Member* organisasi sub-regional tersebut (Arisandy, 2015). Selain Indonesia, terdapat juga satu organisasi kelompok pro kemerdekaan Papua yang ingin mendapatkan status sebagai anggota dari organisasi sub-regional *Melanesia Spearhead Group (MSG)*, yaitu *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*. Organisasi ini diketuai oleh Benny Wenda, seorang keturunan Papua yang telah lama tinggal di London, Inggris dan menggalang dukungan internasional terhadap upaya memerdekakan Papua dari Indonesia. Selain itu ULMWP juga mendapatkan dukungan dari salah dua negara anggota MSG, yaitu Vanuatu dan Kepulauan Salomon.

Posisi Indonesia sebenarnya belum terlalu aman, meskipun di MSG status Indonesia telah ditingkatkan namun Indonesia harus tetap mengantisipasi manuver-manuver politik dari ULMWP serta upaya diplomasinya untuk mengubah sikap Fiji dan Papua Nugini agar menerima mereka sebagai anggota tetap di MSG. Hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia adalah memperkuat pengaruh mereka di MSG, salah satu contoh yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat pengaruh di MSG yaitu dengan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh sekretariat MSG yang dikarenakan beberapa anggota belum membayar iuran tahunan. Seperti yang dikutip dari radionz.co.id, Sade Bimantara juru bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia menyampaikan bahwa:

"....kami telah memberikan kontribusi tahunan kami, terlebih lagi kami juga membantu sekretariat (MSG) dalam pengadaan kendaraan dan barang lainnya untuk sekretariat mereka. Ya, jadi kami telah membantu mereka secara finansial juga" (Goissler, 2018).

Gencarnya diplomasi Indonesia terhadap negara-negara Melanesia yang mendukung penuh kedaulatan Indonesia, serta semakin kuatnya pengaruh Indonesia di MSG menyebabkan perdebatan diantara negara-negara anggota tetap di MSG. Menurut laporan Radio New Zealand, Wakil Perdana Menteri Kepulauan Salomon Manasseh Sogavare menuding Fiji memaksa anggota MSG lain, yakni Papua Nugini dan Vanuatu untuk menerima keanggotaan Indonesia. Langkah itu dianggap bermasalah lantaran MSG cenderung mendukung kemerdekaan bangsa Melanesia di Indonesia dan sedang mempersiapkan keanggotaan penuh bagi organisasi separatisme Papua ULMWP. Sedangkan Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama membalas pernyataan tersebut seperti dikutip media Australia, ABC bahwa:

"Kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak bisa diganggu gugat. Jadi ketika kita berurusan dengan Papua Barat dan penduduknya, kita tidak punya pilihan selain berurusan dengan Indonesia dengan cara positif dan konstruktif" (DEUTSCHE WELLE, 2018).

Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan ekonomi sub-kawasan Melanesia di bawah Kepemimpinan Papua Nugini di *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Dalam Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* di Port Moresby, Papua Nugini, pada 12 Februari 2018 lalu, Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Desra Percaya. Pada kesempatan itu Desra menyampaikan berbagai kemajuan kerjasama Indonesia di MSG. Salah satunya yaitu Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh pada *MSG Regional Security Strategy Working Group (RSS WG)* sejak tahun 2017. Indonesia juga terus mendorong kerjasama yang konkrit di MSG terutama dalam bidang

demokrasi, maritim, lingkungan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat Melanesia.

Kehadiran Indonesia sebagai bagian utuh didalam tubuh MSG, dinilai sangat menguntungkan bagi negara-negara anggota MSG. Secara nyata, Indonesia bertindak sebagai jembatan antara MSG ke berbagai kerjasama regional lainnya, termasuk ASEAN, APEC, dan IORA. Ditambah lagi, sejumlah bantuan teknis terus diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara anggota MSG dan Sekretariat MSG. Indonesia juga berupaya agar MSG dapat difokuskan ke bidang ekonomi dibandingkan bidang politik. Hal tersebut disampaikan oleh Desra setelah pertemuan tersebut.

“Indonesia juga sepenuhnya mendukung usulan Sekretariat MSG untuk terapkan *MSG Corporate Plan 2018-2020* sebagai langkah efektif mencapai visi *MSG 2038 Prosperity for All*. Namun, kami mengingatkan agar para anggota terus menjalankan mandat sesuai prinsip pembentukan MSG, termasuk tidak mencampuri urusan negara lain, apalagi terkait kedaulatan. Penting bagi MSG untuk fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, *good governance* dan keamanan. Untuk itu, perhatian MSG tidak perlu teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan” (Wardhana, 2018).

Di sela-sela pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya juga mengadakan berbagai pertemuan bilateral, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon dan Menteri Pertahanan Fiji, sebagai upaya pendekatan konkrit terkait implementasi kerjasama dalam konteks MSG ke depan. Pertemuan-pertemuan tersebut juga untuk menunjang upaya Indonesia untuk merubah fokus MSG.

Hasil dari diplomasi dan pengaruh Indonesia di MSG tersebut, Indonesia kembali berhasil menggagalkan upaya ULMWP untuk mengajukan diri sebagai anggota tetap MSG. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* tersebut, kelompok separatis Papua ULMWP kembali mengajukan keanggotaannya. Tetapi keanggotaan itu kembali ditolak oleh beberapa negara anggota MSG. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Ketua Delegasi Indonesia pada KTT tersebut, yaitu Desra Percaya bahwa:

"Pada KTT MSG ke-21 di Port Moresby, aplikasi keanggotaan kelompok separatis di *Melanesian Spearhead Group (MSG)* kembali menemui jalan buntu. Atas dasar apapun, jelas tidak ada tempat bagi kelompok separatis," (METROTV NEWS, 2018)

Pada KTT di Port Moresby tersebut, sejumlah pemimpin MSG kembali mempermasalahkan keinginan kelompok ULMWP untuk menjadi anggota penuh di MSG dan menilai bahwa kelompok ini tidak pantas menjadi anggota penuh di MSG. Pembahasan yang dilakukan dalam format *Leaders' Retreat* menyepakati panduan keanggotaan dan mengembalikan aplikasi kelompok separatis tersebut ke Sekretariat. Para pemimpin MSG juga meminta agar Sekretariat MSG merumuskan aturan dan kriteria mengenai keanggotaan. Dengan perkembangan tersebut, maka masih perlu dilakukan pembahasan khusus terkait substansi kriteria keanggotaan dengan menerapkan kembali mekanisme semestinya, yaitu melalui forum tingkat pejabat tinggi, menteri dan terakhir diusulkan ke para pemimpin. Prinsip-prinsip pembentukan MSG yang telah direvisi pada 2015, juga menegaskan bahwa anggota MSG wajib menghormati kedaulatan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Dengan pengambilan keputusan secara konsensus serta dukungan kuat dari sahabat Indonesia di MSG yang menghormati dan junjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan

organisasi, khususnya terkait penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah, maka aplikasi keanggotaan oleh kelompok tersebut akan selalu menghadapi jalan buntu dan tidak mungkin terealisasi. Menurut Desra KTT kali ini membuah hasil yang positif bagi Indonesia, seperti yang dilansir dari metrotvnews.com yaitu:

"Hasil KTT MSG 2015 jelas menegaskan bahwa kehadiran kelompok separatis tersebut di MSG hanyalah sebagai salah satu peninjau mewakili sekelompok kecil separatis yang berdomisili di luar negeri. Pernyataan kelompok separatis yang mengaku sebagai perwakilan resmi masyarakat Papua di MSG, tentunya sangat tidak adil bagi 3,9 juta penduduk Propinsi Papua dan Papua Barat. Lebih dari dua juta warga provinsi Papua dan Papua Barat selama ini telah menjalankan hak demokratisnya dengan bebas dan adil. Aspirasi seluruh rakyat kedua propinsi tersebut terwakili dalam sistem demokrasi terbuka yang ada di Indonesia" (METROTV NEWS, 2018).

Hal tersebut didukung atas hasil penelitian dari Lembaga internasional *Freedom House* menyatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat saat ini, adalah bebas dan adil. Sebagaimana provinsi lainnya, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah *politically free*. Kebebasan berdemokrasi, mengelola anggaran dan pembangunan sendiri tersebut diakui dunia internasional.

Pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-21 *Melanesian Spearhead Group (MSG)* tersebut, Indonesia juga menyampaikan kembali komitmennya untuk menjadi mitra yang kuat bagi negara anggota MSG dalam mewujudkan visi MSG 2038 '*Prosperity for All*', suatu rencana besar 25 tahun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sub-kawasan Melanesia. Hal

tersebut ditegaskan oleh Desra Percaya pada saat KTT berlangsung.

"Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan sub-kawasan Melanesia di bawah keketuaan Papua Nugini di *Melanesian Spearhead Group (MSG)*" (METROTV NEWS, 2018).

Para pemimpin MSG, menyatakan sepakat dengan Desra bahwa penting bagi MSG untuk fokus pada tujuan bersama mencapai kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, *good governance* dan keamanan. Akan sangat merugikan apabila perhatian MSG teralihkan oleh isu-isu yang tidak relevan dengan tujuan tersebut.

2. Mendekatkan Diri Dengan Negara-Negara Mitra Dari Negara-Negara Melanesia

Dalam upaya Indonesia untuk memenagkan hati dari negara-negara Melanesia, pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo juga melakukan pendekatan terhadap negara-negara yang selama ini menjadi mitra dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang termasuk didalamnya negara-negara Melanesia. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam nilai tawarnya di *Melanesian Spearhead Group (MSG)* dibandingkan dengan kelompok separatis Papua ULMWP. Negara-negara yang terus dijaga hubungan baiknya dengan Indonesia yang juga merupakan mitra dari negara-negara Melanesia yaitu Australia, Selandia Baru, dan Chile.

Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia di era Presiden Joko Widodo relatif baik, meskipun tetap ada dinamika didalamnya. Terbaru misalnya, Presiden Joko Widodo menunda kunjunganke Australia pada akhir 2016 sampai waktu yang belum ditentukan, hal itu sebenarnya merupakan respon keras

dari pemerintah Indonesia atas situasi domestik di Australia. Terdapat dua insiden yang menyebabkan Presiden Joko Widodo kecewa, *pertama* adalah insiden penghinaan di Markas Komando Militer Australia di Perth terhadap prinsip-prinsip dasar negara Indonesia pada 2016. *Kedua* adalah pengibaran bendera Papua Merdeka Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne pada Jumat, 6 Januari 2017 (Madu, 2017).

Namun kedua insiden tersebut tidak sampai membuat hubungan kedua negara menjadi tegang, kedua negara memilih untuk menggunakan cara-cara damai dalam penyelesaian masalah tersebut. Presiden Joko Widodo kemudian melakukan kunjungan kenegaraan pada bulan Februari tahun 2017, pada kunjungan tersebut fokus utamanya adalah pada keamanan dan isu-isu ekonomi, termasuk finalisasi kesepakatan perdagangan bebas bilateral pada akhir tahun ini. Pembicaraan juga menyentuh pada pariwisata, keamanan *cyber* dan hubungan sosial.

Indonesia dan Australia sendiri memiliki sejarah hubungan yang tambal sulam, namun kedua pemimpin tertarik untuk menekankan komitmen mereka terhadap hubungan yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang dilansir dari parstoday.com bahwa:

"Hubungan yang kuat dapat dibuat bila kedua negara menghormati integritas wilayah masing-masing, non-interferensi dalam urusan dalam negeri masing-masing dan kemampuan untuk mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan" (PARS TODAY, 2018).

Australia menjadi penting bagi Indonesia dalam isu Papua, karena di Australia banyak terdapat anggota kelompok separatis yang mencari suaka politik ke Australia. Selain itu juga terdapat banyak mahasiswa Indonesia asal Papua yang berkuliah di Australia, sehingga

dengan menjaga hubungan yang erat dengan Australia serta kerjasama yang konkrit diberbagai sektor pemerintah Indonesia optimis pemerintah Australia tidak akan melakukan intervensi dalam isu Papua ini.

Kedekatan Australia dengan negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya termasuk negara-negara Melanesia, menjadi modal yang positif bagi upaya diplomasi Indonesia untuk membendung dukungan internasional terhadap kelompok separatis Papua ULMWP. Faktor historis dan bantuan ekonomi dari pemerintah Australia kepada negara-negara Melanesia terutama Papua Nugini yang merupakan negara bekas koloninya menyebabkan sikap dari pemerintah Australia akan menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan luar negeri negara-negara tersebut. Sehingga ketika Australia bersikap abstain atau malah mendukung pemerintah Indonesia dalam isu Papua ini akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Melanesia dalam isu Papua.

Negara kedua yang merupakan mitra dekat dari negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya juga termasuk negara-negara Melanesia yaitu Selandia Baru. Negara ini menjadi penting bagi negara-negara Pasifik Selatan karena secara geografis, Selandia Baru sangat dekat dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Dengan tingkat kemajuan yang berbeda jauh dengan negara-negara disekitarnya Selandia Baru bersama dengan Australia menjadi kiblat bagi negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya termasuk negara-negara Melanesia. Di Selandia Baru, terdapat banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari berbagai negara dari kawasan Pasifik Selatan, tidak terkecuali dari Indonesia yang berasal dari Papua.

Bercampuranya mereka disana menyebabkan berkembangnya ideologi Melanesianisme atau *Melanesian Brotherhood* tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua untuk

menarik simpati dari mahasiswa-mahasiswa tersebut dan masyarakat lokal Selandia Baru untuk mendukung mereka dalam upaya memerdekakan diri dari Indonesia. Salah satu contohnya yaitu demonstrasi yang dilakukan di Auckland City pada tahun 2017, sebanyak 14 aktivis Suku Maori melakukan aksi demonstrasi yang bertajuk "*Oceania Interrupted Action 3: Free Pasifika – Free West Papua*". Mereka menuntut pemerintah Selandia Baru untuk mendukung gerakan pembebasan Papua tersebut. Kemudian pada tahun yang sama dukungan lain untuk kemerdekaan Papua dari Selandia Baru kembali datang, yakni dari sebelas anggota parlemen yang terdiri dari empat partai politik, yakni Partai Hijau (Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning), Partai Buruh (Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S'ua William Sio), Partai Nasional (Chester Burrows), dan Partai Maori (Marama Fox) (Hasan, 2017).

Pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Indonesia melakukan pendekatan terhadap pemerintah Selandia Baru, salah satu contohnya yaitu kunjungan Presiden Joko Widodo pada Maret 2018. Kunjungan tersebut membahas banyak hal, baik kerjasama maupun membahas isu-isu internasional. hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya seperti yang dikutip dari detik.com bahwa:

"(Perwakilan) menjelaskan posisi Indonesia dalam permasalahan kemanusiaan di Rohingnya, konflik nuklir di Korea, sengketa di Laut China Selatan, Sengketa daging di WTO, IUU Fishing, dan tentu saja soal Papua" (Ramdhani, 2018).

Pemerintah Selandia Baru memang tegas menunjukkan dukungan kepada pemerintah Indonesia terkait isu Papua, hal tersebut dibuktikan dengan pemblokir aktivitas anggota Partai Hijau, Catherine

Delahunty, yang meminta pemerintah mendukung referendum bagi Papua pada tahun 2016 (TEMPO, 2016). Pemerintah Selandia Baru dapat memahami dan posisi Indonesia termasuk soal Papua. Baik pemerintah maupun Ketua oposisi, Simon Bridges yang bertemu Presiden setelah pertemuan dengan pemerintah mengakui integritas teritorial Indonesia.

Selain melakukan kunjungan kenegaraan, Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri untuk bertemu dan berdiskusi dengan 30 mahasiswa Papua yang mewakili total 150 pelajar dan mahasiswa asal Papua yang ada di Selandia Baru. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai keseriusan pemerintah Indonesia di era Presiden Joko Widodo dalam membangun dan memajukan Papua, sehingga semua elemen harus ikut bahu membahu dalam upaya tersebut dan termasuk masyarakat Papua asli tentunya (KEMENLU, 2018).

Selain kedua negara tersebut, terdapat satu negara lagi yang juga merupakan mitra penting bagi negara-negara Pasifik Selatan termasuk didalamnya juga negara-negara Melanesia. Negara tersebut yaitu Chile, negara ini dianggap penting karena geografisnya serta kedekatan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Chile merupakan sebuah negara yang berada di benua Amerika bagian selatan, negara ini secara geografis memiliki keunikan tersendiri karena wilayahnya yang berada dibagian barat benua Amerika dan memiliki garis pantai yang panjang menghadap ke Samudera Pasifik. Dengan garis pantai yang sebegitu panjang, negara ini mengandalkan pendapatan negaranya dari laut. Sehingga tidak mengherankan jika negara ini memiliki armada laut yang besar dan perekonomian yang ditunjang dari sektor perikanan (CIA, 2015).

Dengan begitu negara ini memiliki peranan yang penting di Samudera Pasifik, sehingga tidak mengherankan jika Chile memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

Kekuatan angkatan laut Chile yang bermanfaat untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Samudera Pasifik, selain itu Chile sangat terbuka terhadap negara-negara Pasifik Selatan. Contohnya di Chile menjadi hal yang lumrah ketika menjumpai banyak masyarakat dari negara-negara Pasifik Selatan yang berkunjung kesana, serta mengisi panggung hiburan dengan menampilkan tradisi-tradisi dari negara asal mereka. Seringnya interaksi antara masyarakat dan pemerintah Chile dengan masyarakat dari negara-negara Pasifik Selatan yang didalamnya termasuk negara-negara Melanesia menyebabkan isu Papua dan Melanesia juga berkembang disana.

Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo mengambil langkah jitu untuk memanuver upaya negara-negara Melanesia tersebut. Langkah yang diambil adalah dengan mengangkat Duta Besar Republik Indonesia untuk Chile yang berasal dari Papua, yaitu Philemon Arobaya (KEMENLU, 2015). Pengangkatan Philemon tidak hanya dikarenakan pengalamannya yang sudah puluhan tahun menjadi diplomat Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan kepada pemerintah Chile bahwa Papua merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibuktikan dengan pengangkatan Duta Besar dari ras Melanesia yang berasal dari Papua. Sehingga hal tersebut akan mematahkan argument-argumen dari masyarakat Melanesia tentang pemerintah Indonesia yang melakukan penjajahan di Papua.

Philemon memiliki misi khusus, selain tugas utamanya untuk menjaga persahabatan Indonesia-Chile yang telah berusia lebih dari 50 tahun tepatnya sejak 1965, Ia juga bertugas untuk meyakinkan pemerintah dan masyarakat Chile bahwa pemerintah Indonesia dibawah Presiden Joko Widodo sangat serius dalam membangun dan memajukan Papua. Sehingga pemerintah Chile tidak perlu turut campur dalam isu Papua, karena hal tersebut merupakan urusan dalam negeri Indonesia. Sejauh ini

pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan ketiga negara mitra negara-negara Melanesia tersebut agar isu Papua dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah Indonesia tanpa campur tangan pihak asing. Dengan abstainnya negara-negara tersebut maka juga berpengaruh terhadap dukungan kepada kelompok separatis Papua dari negara-negara Pasifik Selatan, termasuk negara-negara Melanesia. Setidaknya sudah ada dua negara Melanesia yang diyakinkan oleh pemerintah Indonesia untuk tidak mendukung kelompok separatis Papua dan mendukung penuh kedaulatan Indonesia di Papua, yakni Fiji dan Papua Nugini.